

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPEDDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**M. MAKRUF DWIPRASOJO
178520033**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

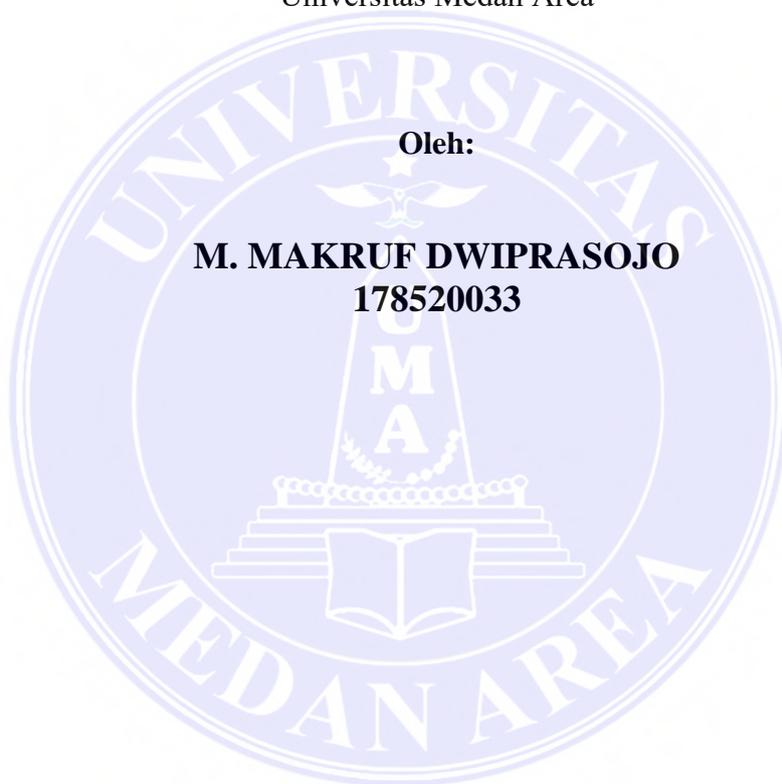
**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPEDDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

M. MAKRUF DWIPRASOJO
178520033



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Makruf Dwiprasojo
NPM : 178520033
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas/akhir/skripsi/tesis saya seama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Yang menyatakan



(M. Makruf Dwiprasojo)

Format halaman pengesahan

Judul Skripsi : Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappedda) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Medan
Nama : M. Makruf Dwiprasojo
NPM : 178520033
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. Beby Mashito Batubara S.AP,M.AP
Pembimbing I



Agung Suharyanto S.Sn.M.Si
Pembimbing II



Dr. Walid Musthafa S., S.Sos., M.IP
Dekan



Dr. Gus Yusra Muda, M.A.P
Ka. Prodi/WD I

Tanggal lulus : 18 April 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 23 Oktober 2023



Dwiprasojo
178520033

ABSTRAK

Salah satu dokumen yang wajib di susun oleh BAPPEDA adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan disebut RKPD yang memuat kerangka ekonomi dan program prioritas pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peranan BAPPEDA serta Faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan RKPD Kota Medan. Hasil penelitian Peranan BAPPEDA dalam Penyusunan RKPD Kota Medan adalah merumuskan kebijakan pembangunan daerah kota Medan dan mengevaluasi terhadap rancangan awal RKPD, mengevaluasi dan menyempurnakan rancangan RKPD, bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dari program dan kebijakan pembangunan, dan menjadikan dasar Penyusunan Rancangan akhir RKPD Kota Medan sebagai penetapan RKPD. Faktor penghambat adalah masih ada ego sektoral antar OPD dan faktor pendukung adalah pemanfaatan sistem e-DevPlan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga kota.

Kata Kunci: Bappeda, Peranan, Penyusunan RKPD

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Makruf Dwiprasojo
NPM : 178520033
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas/akhir/skripsi/tesis saya seiaman tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Yang menyatakan



(M. Makruf Dwiprasojo)

Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 3 September 1998 dari ayah Suyono dan ibu Siti Asura. Penulis merupakan putra dari empat bersaudara.

Tahun 2015 Penulis lulus dari SMA Muhammadiyah 18 Sunggal dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Bagian Fisik dan Tata Ruang kantor PEMKO Medan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil di selesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah pemerintahan dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Dr. Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP, selaku Dekan Universitas Medan Area.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Indra Muda, MAP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Beby Mashito Batubara S.AP,M.AP sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
4. Terima kasih kepada Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
5. Terima kasih kepada Kepala Bagian Umum PEMKO Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih untuk seluruh staf dan pegawai BAPPEDA Kota Medan yang telah memberikan masukan kepada peneliti untuk percepatan penyusunan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Medan Area (UMA) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalamannya.
8. Terima kasih ayah dan ibu yang telah memberikan doa dan dukungan moril serta materil.
9. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan, dukungan, persahabatan, dan persaudaraan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(M. Makruf Dwiprasojo)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DARTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Peranan	6
2.1.1 Defenisi Peranan	6
2.1.2 Cakupan Peranan.....	6
2.1.3 Jenis-jenis Peranan.....	8
2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	9
2.2.1 Perencanaan	9
2.2.2 Pembanguna.....	9
2.2.3 Defenisi Perencanaan Pembangunan	10
2.3 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	11
2.3.1 Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	12
2.3.2 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	14
2.4 Penelitian Terdahulu.....	16
2.5 Kerangka Berpikir.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3.1.1 Tempat Penelitian	23
3.1.2 Waktu Penelitian.....	23
3.2 Metodologi Penelitian.....	24
3.2.1 Jenis Penelitian	24
3.2.2 Informan Penelitian.....	24
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.2.4 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	29
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	29

4.1.2	Gambaran Umum BAPPEDA Kota Medan.....	28	
4.1.3	Sejarah Singkat Berdirinya BAPPEDA Kota Medan	28	
4.2.	Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Medan	29	
4.2.1	Deskripsi Jabatan	29	
4.3	Visi Misi BAPPEDA Kota Medan	30	
4.4	Keadaan Pegawai BAPPEDA Kota Medan.....	37	
4.5	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.....	38	
4.5.1	Pendekatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	40	
4.5.2	Hubungan Antar Dokumen.....	43	
4.5.3	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan	44	
4.6	Peranan BAPPEDA Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan	45	
4.7	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan	58	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN			
5.1	Kesimpulan	60	
5.2	Saran	66	
DAFTAR PUSTAKA.....			67
LAMPIRAN.....			69
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....			69
Lampiran 2 Syrat Selesai Penelitian			70
Lampiran 3 Pedoman Wawancara			71
Lampiran 4 Dokumentasi			74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Penulisan Skripsi.....	23
Tabel 4.2 Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kota Medan.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Medan	29
Gambar 4.3 Bagan Antar Hubungan Dokumen Terhadap RKPD Kota Medan.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surai Izin Penelitian.....	69
Lampiran 2 Surat Selesai Penelitian	70
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	71
Lampiran 4 Dokumentasi Saat Penelitian di BAPPEDA Kota Medan.....	74



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan kawasan metropolitan dan menjadi kota terbesar keempat di Indonesia. Alasan kota Medan dijuluki metropolitan, karena memiliki kawasan industri, kawasan komersial, jaringan transportasi, infrastruktur, dan area perumahan. Hal itu semua bisa tercipta, disebabkan adanya tahap pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tahapan pembangunan daerah kota Medan diperlukan adanya pedoman, pengendalian, serta pengawasan dalam pencapaian sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan daerah yang wajib di susun tersebut adalah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah dan program prioritas pembangunan daerah. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran tentang kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan serta pembiayaan pembangunan kota. Program prioritas pembangunan daerah meliputi penuntasan kemiskinan, pengangguran, permasalahan sosial lainnya, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, layanan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif dan menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan publik dan teknologi, penataan ruang, pengembangan wilayah dan penataan kawasan budaya (RKPD, 2022).

Adapun manfaat dari pembangunan daerah yang diharapkan belum merata. Masih adanya masyarakat yang mengeluhkan permasalahan infrastruktur, banjir, perlambatan pertumbuhan ekonomi, masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kerawanan sosial masih sering terjadi, belum optimalnya tata kelola UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, penanganan dan pengelolaan persampahan yang belum maksimal, fasilitas pendidikan yang belum merata. Akibatnya kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik (RKPD,2022).

Untuk mengatur supaya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota Medan dapat terprogram dengan baik, diperlukan adanya peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA adalah unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah yang juga bertindak sebagai unit kerja perangkat Gubernur/Walikota/Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan. Peranan BAPPEDA Kota Medan diatur dalam peraturan kota Medan nomor 5 tahun 2001 dan dalam keputusan wali kota Medan. BAPPEDA bertugas untuk membantu walikota dalam pembangunan kota Medan dan penilaian.

Adapun tugas pokok BAPPEDA merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi serta tugas pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun dalam merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan mengalami kendala. Kendala muncul disebabkan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan kota yang dapat digunakan

dan dimanfaatkan sebagai dana untuk merealisasikan semua rencana program kegiatan pembangunan kota secara tepat waktu (RKPD,2022).

Salah satu faktor yang memengaruhi adanya keterbatasan sumber pembiayaan adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang masih relatif sentralistis. Sehingga berdampak pada kurangnya peluang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru dan optimal. Hal itu dapat menjadi penghambat dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) . Dimana dalam penyusunannya membutuhkan pendanaan. Akibatnya perealisasi Rencana Kerja Pembangunan daerah kota Medan menjadi terganggu.

Untuk mengatasi kendala yang timbul saat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), BAPPEDA memiliki peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BAPPEDA dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan BAPPEDA dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak positif serta dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Administrasi Publik, untuk memperkaya kepustakaan bidang perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), melalui penyusunan kebijakan dan dapat menjadi bahan masukan maupun perbandingan bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak BAPPEDA kota Medan tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota Medan.
- b. Bagi Penulis, dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Proses mencari, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dapat membantu penulis untuk memahami topik dengan lebih baik dan meningkatkan keahlian mereka dalam analisis dan sintesis informasi.

- c. Bagi masyarakat, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemecahan masalah, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan terutama dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, Bappeda dapat memastikan bahwa RKPD mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih baik serta mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai pemangku kepentingan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peranan

2.1.1 Defenisi Peranan

Peranan adalah aspek dinamik dalam jabatan. Ada banyak pendapat yang mengemukakan tentang pengertian peranan antara lain menurut Merton dalam Raho (2007: 276) menyatakan :

“Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*Role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran, yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus”

Menurut Riyadi (2002: 138) menyatakan, bahwa :

“Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya)”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah kontribusi yang diharapkan dari seseorang dalam melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang sedang ia jalankan.

2.1.2 Cakupan Peranan

Cakupan peranan merupakan wilayah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dalam sebuah organisasi, proyek, atau situasi tertentu. Menurut Mintzberg dalam Siswanto (2012:21) menyatakan cakupan peranan sebagai beriku ini:

“1. Peranan Antarperibadi (*Interpersonal Role*)

Dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan antarperibadi meliputi:

- a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)

Dalam peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal ini meliputi:

- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:
 - 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 - 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 - 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya”.

Menurut Soekanto (2012:213) menyatakan:

“Cakupan peranan dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi:
 - a. Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

2.1.3 Jenis-Jenis Peranan

Menurut Elfrida dalam Soekanto (2002,10) Menyatakan:

“Tiga jenis peranan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai idealnya atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau di kehidupan sosial yang terjadi secara nyata”.

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan bidang.

Menurut Hadiwijoyo dan Anisa (2020,3) menyatakan :

“Perencanaan adalah suatu proses kontinu, terdiri dari keputusan pemilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Ini berarti bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan, terlebih dahulu harus membuat perencanaan yang memuat tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut. Penyusunan perencanaan tersebut mengindikasikan adanya organisasi yang terlibat, dokumen yang digunakan di dalam perencanaan, dukungan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, dan tujuan yang jelas untuk dicapai”.

Billi dan Azwar dalam Hasibun, (2021,2) menyatakan bahwa perencanaan adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dan berbagai kemungkinan yang tersedia yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan adalah langkah penting untuk mencapai hasil yang diinginkan di masa yang akan datang.

2.2.2 Pembangunan

Pembangunan bukanlah proses yang sederhana atau seragam, dan pendekatan pembangunan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan

tujuannya. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Mulayanto dan Abdoellah, (2019,20) proses mengubah alam dan dunia sosial-ekonomi memungkinkan orang mencapai potensi-potensi kemanusiaannya melalui sarana ekonomi-politik.

Mahi, (2017,29) menyatakan pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*Valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi yang paling humanistik.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan adalah sekumpulan tindakan yang dikerjakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur suatu wilayah, negara, atau komunitas.

2.2.3 Defenisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Sopannah, (2023,14) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah pengarahannya sumber-sumber pembangunan yang terbatas untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Kuncoro, (2018,4) menyatakan perencanaan pembangunan daerah memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah proses merancang, mengatur, dan

mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu.

2.3 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai faktor seperti berkelanjutan lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan politik. Menurut Hadiwijoyo dan Annisa (2020:54) menyatakan :

“Penyusunan dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dirumuskan secara berikut :

- a. **Transparan.** Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
- b. **Responsif.** Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. **Efisiensi.** Pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- d. **Efektif.** Kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. **Akuntabel.** Setiap kegiatan dan hasil akhir perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. **Partisipatif.** Hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. **Terukur.** Penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara mencapainya.
- h. **Berkeadilan.** Prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.
- i. **Berwawasan lingkungan.** Mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. **Berkelanjutan.** Pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan

potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia”.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun .

Anggara dan Sumantri (2016:141) menyatakan:

“RPJM daerah merupakan penjabaran misi, visi, dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah lintas satuan kerja perangkat daerah, program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

Hadiwijoyo dan Anisa (2020: 40) menyatakan:

“RKPD yang merupakan perencanaan tahunan daerah adalah penjabaran dari RPJM daerah mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

2.3.1 Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Hadiwijoyo dan Anisa (2020,40) menyatakan:

“Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan kombinasi pendekatan politis, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).

1. Pendekatan politik berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon kepala daerah merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun selama kepala daerah terpilih memimpin daerah. Namun dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut harus mengacu kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional.

2. Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian, sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi secara komprehensif.
3. Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar objek, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan). Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan BAPPEDA dan SKPD. BAPPEDA sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan rencana strategis SKPD. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan Musrenbang.
5. Pendekatan bawah atas (*bottom up*) dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang dimaksud sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten/kota”.

Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substantif menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan, atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.

2.3.2 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu bagian dari Rencana Kerja Pembangunan daerah. Hadiwijoyo dan Anisa (2020,67) menyatakan:

“Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dengan tahapan disesuaikan dengan tahapan dokumen perencanaan jangka menengah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diawali dengan tahapan persiapan, yang dilakukan dengan tahapan antara lain:

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan
4. Peyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Hadiwijoyo dan Anisa (2020: 67) menyatakan :

“Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember dua tahun sebelum tahun rencana. Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, Program strategis nasional dan penyusunan RKPD. Sementara itu rancangan awal RKPD kabupaten/kota di susun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD”.

Hadiwijoyo dan Anisa (2020: 68) menyatakan :

“Secara makro, ruang lingkup Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tertuang dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2001 dengan cakupan substansi antara lain: 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah; 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi

daerah; 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah; 4) Penelaahan rancangan awal rencana kerja (Renja) perangkat daerah; Perumusan permasalahan pembangunan daerah; 5) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD; 6) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; 7) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; 8) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; 8) Perumusan prioritas pembangunan daerah; 9) perumusan rencana kerja program dan pendanaan”.

Hadiwijoyo dan Anisa (2020: 69) menyatakan:

“Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: 1) pendahuluan; 2) gambaran umum; 3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 5) rencana kerja dan pendanaan daerah; 6) kinerja penyelenggaraan pemerintha daerah; 7) penutup.”

Hadiwijoyo dan Anisa (2020,69) menyatakan :

“Rancangan awal RKPD selanjutnya dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD”.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terkait dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dareah (Renja SKPD). Dimana Renja SKPD merupakan rencana kerja lebih terperinci yang disusun masing-masing SKPD dalam lingkup pemerintah daerah. Renja SKPD menjadi penjabran lebih rinci dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk masing-masing SKPD.

Hadiwijoyo dan Anisa (2020,77) menyatakan :

“Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Renja SKPD sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD. Persiapan penyusunan renja perangkat daerah meliputi langkah-langkah antara lain: 1) Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja perangkat daerah; 2) Orientasi mengenai Renja perangkat daerah; 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja perangkat daerah; 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD”.

Menurut Hadiwijoyo dan Anisa (2020: 78) menyatakan:

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renja SKPD. Rancangan Renja SKPD selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.”

“Selanjutnya rancangan Renja yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA yang telah selaras dengan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) akan dirumuskan menjadi rancangan akhir renja SKPD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan Perumusan rancangan akhir Renja SKPD (Hadiwijoyo dan Anisa, 2020:79)’.

Setelah Renja SKPD selesai maka dijadikan dasar penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kemudian rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi bahan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diselenggarakan oleh BAPPEDA. Musrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah. Pada akhirnya BAPPEDA melakukan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan peraturan kepada daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, sering juga disebut sebagai tinjauan pustaka atau kajian literatur, adalah proses mempelajari dan menyusun hasil-hasil penelitian atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian
1	Satris Ali Sandra, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia, 2022.	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue 2022.	Peran Bappeda Kabupaten Simeulue dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue 2022 belum terlaksana dengan baik. Karena mengalami disinsentif seperti lambatnya penyampaian data yang dibutuhkan, kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kurangnya transfer ke dana daerah (TKDD).	Persamaan: Berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Satris Ali Sandra terdapat persamaan penelitian dimana faktor yang menghambat BAPPEDA dalam Penyusunan RKPD, yaitu kurangnya transfer ke dana daerah.
2	Muhamad Chandra Gustama, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2013.	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur.	Peranan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di dalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara fungsional berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah, seperti penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan perannya, BAPPEDA masih mengalami hambatan	Persamaan: Berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Muhammad Chandra terdapat persamaan yaitu dalam menjalankan perannya untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah mengalami hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia.

			terutama pada sumber daya manusianya	
3	Jurnal Administrasi Negara	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kota Manado.	Pemerintahan Kota Manado mempunyai tugas pokok yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Rencana umum tata ruang, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh Rencana Kerja Pembangunan dengan dinas dan instansi vertikal yang ada didaerah Kota Manado. Hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA Kota Manado adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan dalam melakukan pekerjaan	Perbedaan : Sehubungan dengan hal ini sesuai dengan daftar jurnal riset hasil sebelumnya yang di lakukan oleh Cindy Ratu pada tahun 2009 memiliki perbedaan dengan analisis penelitian kali ini. Hal ini di buktikan dengan hasil jurnal tersebut bahwa hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA Kota Manado adalah kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini terdapat perbedaan dengan hasil penelitian dalam skripsi ini, yaitu peran Bappeda dalam perumusan perencanaan terhambat bukan karena masalah sarana dan prasarana, melainkan belum maksimalnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang melakukan penyusunan program kegiatan dan anggaran terhadap dokumentasi perencanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Setio Rini. Administrasi Negara, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda. 2016.	Peranan Bappeda Kota Samarinda Dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda ULU)	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu menurut hasil penelitian penulis belum berjalan secara optimal. Peranan Badan Perencanaan	Perbedaan : Berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Setio Rini terdapat perbedaan dalam analisi penelitian dimana Peranana BAPPEDA sebagai fasilitator Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu yang di lakukan belum optimal.

			Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu sejauh ini sudah baik.	Sementara di penelitian ini peran BAPPEDA dalam kegiatan Musrenbang sebagai Fasilitator telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota Medan. Persamaan : berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Setio Rini terdapat persamaan, yaitu sebagai Koordinator dalam Musrenbang sudah baik atau telah optimal.
5	Fahrizanur, Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2017	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Paser	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintah maupun dengan swasta/masyarakat.	Perbedaan : Berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Fahrizanur terdapat perbedaan dimana dalam penelitiannya (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintah maupun dengan swasta/masyarakat. Sementara dalam penelitian ini dalam menjalankan perannya BAPPEDA terkait pihak eksternal memiliki kendala, yaitu masih terdapat adanya ego sektoral antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga terkadang sulit melakukan koordinasi antar OPD.

Sumber : Kajian Penelitian

2.5 Kerangka Berpikir

Kota Medan dijuluki metropolitan, karena memiliki kawasan industri, kawasan komersial, jaringan transportasi, infrastruktur, dan area perumahan. Hal itu semua bisa tercipta, disebabkan adanya tahap pembagungan daerah. Untuk melaksanakan tahapan pembagungan daerah kota Medan diperlukan adanya

pedoman, pengendalian, serta pengawasan dalam pencapaian sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang Tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2021 tentang RKPD Tahun anggaran 2022, salah satu dokumen perencanaan daerah yang wajib di susun oleh BAPPEDA adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD. RKPD mencakup dalam memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan program prioritas pembangunan daerah. Namun dalam merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengalami kendala, disebabkan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan kota yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dana untuk merealisasikan semua rencana program kegiatan pembangunan kota secara tepat waktu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya keterbatasan sumber pembiayaan adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang masih relatif sentralistis. Sehingga berdampak pada kurangnya peluang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru dan optimal. Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul saat pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), BAPPEDA memiliki peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal itu tertuang dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BAPPEDA kota Medan berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, setiap BAPPEDA berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hadiwijoyo dan Anisa, (2020: 67) menyatakan RKPD ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dengan tahapan disesuaikan dengan tahapan dokumen perencanaan jangka menengah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peranan menurut Mintzberg dalam Siswanto (2012:21), yaitu peranan antarperibadi (*interpersonal role*) dimana BAPPEDA harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung antar organisasi, peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*) dimana BAPPEDA sebagai peran pemantau (*Monitor*), sebagai diseminator atau menyebarkan informasi mengenai Rencana Kerja Pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, sebagai juru bicara (*Spokesman*), dan peranan pengambil keputusan (*decisional role*) dimana peranan BAPPEDA harus terlibat dalam suatu proses pembuatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang memerlukan pemahaman mendalam dan memadukan teori dengan temuan empiris untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang topik penelitian, yaitu “Peranan BAPPEDA Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan”. Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusi potensial terhadap pemahaman peran BAPPEDA dalam penyusunan RKPD kota Medan. Rencana waktu penelitian mencakup tahapan-tahapan penelitian dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh data empiris terkait dengan topik penelitian. Keterbatasan yang timbul selama meneliti terdapat saat mengumpulkan informasi, dimana keterkaitan dengan sibuknya narasumber dalam mendukung data dan temuan dalam penelitian. Hal tersebut diatas dapat membantu peneliti dalam melihat peranan BAPPEDA dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2022 yang dilakukan di kantor Walikota Medan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada BAPPEDA Kota Medan yang berlokasi di kantor Walikota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2022 s/d April 2024.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian dan Penulisan Skripsi

No	Aktivitas	Bulan																	
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																		
2	Penyusunan dan bimbingan proposal																		
3	Ujian seminar proposal skripsi																		
4	Perbaikan proposal skripsi																		
5	Pengumpulan data																		
6	Penyusunan dan bimbingan skripsi																		
7	Persiapan berkas																		
8	Seminar hasil																		
9	Perbaikan BAB 4 dan BAB 5																		
10	Sidang meja hijau																		

Sumber: Penulis

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud memahami gejala mengenai apa yang diperoleh Subjek Penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kalimat atau bahasa pada suatu kontes serta memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu, agar fokus penelitain sesuai dengan fakta lapangan dan mendapatkan gambaran umum dari fenemona yang dialami subjek penelitian. Didasari hal itu penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif.

Craswell dalam Zakariah dkk (2020, 28) menyatakan bahwa penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau *setting* alamia.

Alasan lain memakai langkah Kualitatif karena untuk membantu menjelaskan kompleksitas dan nuansa dalam pengalaman manusia dalam berbagai faktor. Sehingga Peneliti dapat mengetahui secara mendeteil dan terinci tentang Peranan BAPPEDA dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan. Selain itu dapat menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan hambatan BAPPEDA dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan.

3.2.2 Informan Penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif, informan sering disebut sebagai peserta penelitian. Peserta penelitian merupakan kunci bagi pengungkapan makna sosial, karena mereka memiliki akses langsung ke pengalaman dan interpretasi tentang

dunia di sekitar mereka (Atkinson, 1995, 46). Didasari hal itu informan atau subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai BAPPEDA Kota Medan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Informan utama, yaitu Bapak Sekretaris BAPPEDA Drs. M. Syafruddin, Ms, Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program Julfikri Masril, ST, MT, Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan Taufik Teguh Pribadi, S.Kom, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Medan Shandra Himalaya, SE, MM, Tim Lingkup Perencanaan dan Pendanaan Irfan Hakim Ritonga, S.Sos, M.I.Kom, Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi Derty Ginting S.si dan Analisis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Herpandi, A.md dan informan tambahan yaitu Kassubbag Umum dan Kepegawaian Siti Khadijah, SH dan Pengelola Sarana Prasarana Kantor Zainul Hakim Lubis.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Sarosa Samiaji (2021:20) menyatakan pengumpulan data kualitatif dapat menggunakan berbagai cara yaitu:

1. Observasi merupakan pengamatan kepada objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan peranan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh pihak BAPPEDA Kota Medan.
2. Melakukan wawancara dengan melibatkan beberapa orang partisipan. Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan dengan informan (Pegawai Bappeda) agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

3. Teknik Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dari kumpulan arsip atau dokumentasi yang disimpan.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif (masalah/fenomena sosial pada manusia dengan segala perilakunya) menggunakan konteks alamiah, mampu menyesuaikan pendekatannya dengan situasi untuk menghasilkan deskripsi mendalam mengenai fenomena termasuk pemahaman tentang bagaimana dan mengapa itu terjadi. Didasari hal itu penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman akan makna agar bisa mengembangkan teori dan menggambarkan realita yang kompleks dari sesuatu yang di amati (Mardawani, 2020:8-10)

Sarosa Samiaji (2021:3-4) menyatakan bahwa tahapan analisis data kualitatif dilaksanakan setelah tahapan pengumpulan data dilakukan seperti cara berikut:

1. Memadatkan data yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasi data mentah. Memadatkan data istilah lain dari mereduksi data . Reduksi data adalah semua data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan di susun berdasarkan data yang diperoleh, disaring, dirangkum, di pilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi kedalam suatu bentuk atau membantu penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi kesimpulan, yaitu proses memastikan bahwa data telah diperiksa dengan cermat dan didukung oleh bukti yang kuat dan valid. Ini melibatkan langkah-langkah seperti mengevaluasi bukti, melakukan analisis kritis, konsultasi dengan ahli, reproduksi, transparansi dan replikabilitas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis data, maka peneliti menyimpulkan:

- 1) Peranan BAPPEDA dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
 - a) BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan di daerah membentuk tim penyusunan dokumen RKPD. Setelah tim terbentuk dimulailah tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
 - b) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, peranan BAPPEDA ditahap ini adalah merumuskan kebijakan pembangunan daerah kota Medan yang akan menjadi dasar penyusunan RKPD, sebagai koordinator dengan *stakeholder*, merumuskan program dan kegiatan yang akan masuk ke dalam RKPD tahunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKPD berdasarkan hasil-hasil perumusan kebijakan, analisis, dan masukan dari *stakeholder* dan masyarakat, mengevaluasi terhadap rancangan awal RKPD sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan.
 - c) Penyusunan Rancangan RKPD, peranan BAPPEDA ditahap ini adalah melakukan koordinasi kembali dengan *Stakeholder*, Kami BAPPEDA mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur kota, melakukan konsultasi publik, dan melakukan

evaluasi dan tahap penyempurnaan terhadap rancangan RKPD sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan.

- d) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Medan, peranan BAPPEDA di tahap ini adalah merumuskan materi Musrenbang yang akan dibahas dalam Musrenbang, mengkoordinasi dan mengelola acara pada seluruh proses pelaksanaan Musrenbang, memberikan informasi kepada peserta Musrenbang tentang Rencana Kerja Pembangunan daerah, prioritas, dan kendala yang ada, memberikan arahan teknis kepada peserta Musrenbang, sebagai fasilitator dalam diskusi Musrenbang, merekam usulan dengan mencatat usulan-usulan yang diajukan oleh peserta Musrenbang, mengavaluasi dan menyusun dokumen hasil Musrenbang Kota Medan, menyampaikan hasil Musrenbang kepada Pemerintah Kota Medan dan memonitoring serta mengavaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kota Medan.
- e) Perumusan Rancangan akhir RKPD, peranan BAPPEDA ditahap ini adalah mengkoordinasikan proses perumusan rancangan akhir, menganalisis dan mengevaluasi terhadap berbagai usulan dan rencana yang telah diajukan oleh dinas teknis dan instansi terkait, secara aktif terlibat dalam penyusunan dokumen rancangan akhir, mengkonsultasikan dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya, mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dari program dan kebijakan pembangunan.

- f) Penetapan RKPD Kota Medan, peranan BAPPEDA di tahap ini adalah menjadi koordinator utama dalam penyusunan RKPD, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur Kota Medan, menganalisis dan mengevaluasi usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh dinas dan lembaga pemerintah daerah, menjadikan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Medan menjadi menjadi dasar untuk diskusi dan konsultasi lebih lanjut, melibatkan masyarakat dalam proses penetapan RKPD dengan mengadakan konsultasi publik atau pertemuan terbuka, menjadikan dasar Penyusunan Rancangan akhir RKPD Kota Medan sebagai kebijakan pembangunan yang telah disepakati dan direkomendasikan untuk penetapan, menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kota Medan kepada Pemerintah Kota Medan untuk persetujuan dan penetapan, terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- 2) Hasil temuan penelitian yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian mengenai peranan BAPPEDA Kota Medan untuk melakukan penyusunan RKPD Kota Medan adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara, maka temuan peneliti dalam BAPPEDA menjalankan peranannya untuk membentuk tim sempat mengalami kendala, hal itu disebabkan belum maksimalnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang melakukan penyusunan program

- b. kegiatan dan anggaran terhadap dokumentasi perencanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara, maka temuan peneliti dalam BAPPEDA menjalankan peranannya memiliki kendala, yaitu masih terdapat adanya ego sektoral antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga terkadang sulit melakukan kordinasi antar OPD, yang mana diketahui OPD merupakan entitas yang lebih umum dan luas. Sebuah OPD bisa mencakup beberapa SKPD yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Tentuanya masalah koordinasi antar OPD tersebut akan menghambatnya Renja SKPD. Hal itu berdampak bisa berdampak terlambatnya penyusunan rancangan awal RKPD.
- d. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara, maka temuan peneliti dalam BAPPEDA menjalankan peranannya sudah baik yaitu abstrak Rancangan RKPD Kota Medan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kota Medan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota Medan. Dalam tahapan penyusunan rancangan RKPD Kota Medan ini, proses penyusunan rancangan Renja dilakukan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, dan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan ranwal Renja penyusunan rancangan RKPD kota Medan, menyampaikan rancangan Walikota dan surat edaran Walikota tentang rancangan RKPD kota Medan.

- e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara, maka temuan peneliti dalam BAPPEDA menjalankan peranannya sebagai penyelenggara telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota Medan. Terlihat dapat menghadirkan peserta yang memang berperan penting dalam kesuksesan kegiatan Musrenbang Kota Medan. Apa yang di utarakan oleh pihak-pihak yang turut serta dalam Musrenbang kota Medan telah menjadi prioritas pembangunan didalam RKPD Kota Medan
- f. Rancangan Akhir RKPD Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara, maka temuan peneliti dalam BAPPEDA menjalankan peranannya telah optimal. Dilihat dari hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Medan yakni menyempurnakan rancangan RKPD Kota Medan telah dilakukan. Sehingga hasil dari kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Medan bisa dilakukan suatu perumusan yaitu rancangan Akhir oleh BAPPEDA kota Medan untuk dijadikan suatu bahan dalam penyusunan rancangan tentang RKPD Kota Medan.
- g. Penetapan RKPD yang menjadi dokumen RKPD Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara, maka temuan peneliti dalam BAPPEDA menjalankan peranannya telah optimal. Hal ini terlihat dari disahkannya rancangan akhir RKPD Kota Medan menjadi RKPD Kota Medan. Sehingga RKPD Kota Medan bisa dijadikan sebagai acuan pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan, menjadi acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) Kota Medan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Medan dan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.

- 3) Faktor Penghambat Penyusunan RKPD Kota Medan yaitu :
 - a. Masih ada ego sektoral antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga terkadang sulit melakukan kordinasi antar OPD.
 - b. Belum maksimalnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang melakukan penyusunan program kegiatan dan anggaran terhadap dokumentasi perencanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Masih adanya potensi ke daerah yang belum teridentifikasi sehingga tidak tertuangnya ke RKPD.
 - d. Kurangnya data informasi yang dibutuhkan
 - e. Adanya keterbatasan sumber pembiayaan adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang masih relatif sentralistis. Sehingga berdampak pada kurangnya peluang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru dan optimal dalam perealisasiian peyusunan RKPD.
- 4) Faktor Pendukung penyusunan RKPD Kota Medan yaitu:
 - a. Dalam hal Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan pemanfaatan sisitem *E-Planning* tersebut dimulai dari rembuk warga sampai, Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan hingga sampainya kegiatan dapat diverivikasi oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sehingga program dan kegiatan dapat berjalan maka perencanaan tersebut terpantau diaplikasi *E-Planning*.

- b. e-DevPlan Kota Medan merupakan alat sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga kota. Hal ini dapat membantu penyusunan RKPD. e-DevPlan Kota Medan berisikan berbagai rencana kerja dari Pemko Medan yang telah disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat dan dapat langsung diakses oleh masyarakat melalui situs www.e-devplankotamedan.go.id. ini memiliki beberapa menu dalam aplikasi yang dapat kita akses seperti, Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokok Pikiran, RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan KUA/PPAS.

5.2 Saran

1. Diperlukan adanya wacana yang baik antara pihak Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) dengan lembaga lainnya dalam mengoptimalkan peran Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kota Medan.
2. Penyesuaian anggaran merupakan hal yang musti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal OPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terkendala, maka dibutuhkan ketetapan atau hukuman terhadap OPD yang tak mengindahkan rapat koordinasi sehingga daya guna dan ketepatan aktualisasi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atkinson, Paul (1995). *Qualitative Research: Unity and Diversity*, New Delhi: Great Britain by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall
- Anggara, Sahaya dan Ii Sumantri (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hadiwijo, Suryo Sakti dan Fahima Diah Anisa (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Berbasis SDGs*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Reptan (2021). *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management
- Kadir, Abdul (2012). *Pembangunan Berkelanjutan: Era Otonomi Daerah Di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kuncoro, Mudarajad (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mahi, Ali Kabul (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Kencana
- Mardawani (2020). *Praktisi Penelitian Kualitatif : Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman (2005). *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Mulyanto dan Abdoellah (2019). *Isu-isu Pembangunan: Pengantar Teoritis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Raho, Bernard (2007). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Riyadi, Dodi Slamet (2002). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Konsep Dasar*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BBPT.
- Sarosa, Samiaji (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius

Siswanto (2012). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono (2002). *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sopannah, Ana (2023). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Implementasi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Zakariah, Askari dkk (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahma

Jurnal

Fahrizanur. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan 4: 1599-1612.

Gustama, M. Chandra. 2013. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Administrasi Negara 1.

Ratu, Cindy. 2009. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kota Manado. Jurnal Administari Negara.

Rini, Setio. 2017. Peranan Bappeda Kota Samarinda Dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda ULU). eJournal Ilmu Administrasi Negara 2:5948-5961.

Sandra, Satri Ali. 2022. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue 2022. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3:390-397.

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: SK.23/HUK/1975 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Perubahan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Medan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.





Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan

Wawancara ini disusun berdasarkan teori peranan dari Mintzberg dalam Siswanto (2012:21) yaitu:

1. Peranan Antarperibadi (*Interpersonal Role*)
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Berikut ini draf pertanyaan yang di ajukan kepada informan penelitian :

1) Informan Utama (*Key Informan*)

Nama Informan :

1. Bapak Sekretaris BAPPEDA Drs. M. Syafruddin, Ms
2. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program Julfikri Masril, ST. MT
3. Penyusunan Prorgam Anggaran dan Pelaporan Taufik Teguh Pribadi, S.Kom
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Medan Shandra Himalaya, SE, MM,
5. Tim Lingkup Perencanaan dan Pendanaan Irfan Hakim Ritonga, S.Sos, M.I.Kom,
6. Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi Dorty Ginting S.si dan Analisis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Herpandi, A.md

a. Peranan Antarperibadi (*Interpersonal Role*)

1. Bagaimana langkah-langkah awal yang diambil oleh BAPPEDA dalam memulai proses penyusunan RKPD Kota Medan?
2. Bagaimana peranan BAPPEDA sebagai figur atau simbol kepemimpinan dalam proses penyusunan RKPD Kota Medan?
3. Bagaimana BAPPEDA mendefinisikan peranannya dalam penyusunan RKPD?
4. Bagaimana BAPPEDA bertindak sebagai penghubung antar organisasi dalam proses penyusunan RKPD Kota Medan?
5. Bagaimana BAPPEDA melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada tahap-tahapan penyusunan RKPD Kota Medan?

b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)

1. Bagaimana BAPPEDA memfasilitasi kerja sama dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terlibat dalam penyusunan RKPD Kota Medan?
2. Bagaimana BAPPEDA berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti LSM, sektor swasta, atau komunitas lokal, dalam rangka penyusunan RKPD Kota Medan?
3. Bagaimana upaya khusus yang dilakukan untuk membangun dukungan dan keterlibatan pihak eksternal dalam penyusunan RKPD Kota Medan?
4. Bagaimana BAPPEDA menjelaskan visi dan program-program yang terkandung dalam RKPD Kota Medan kepada masyarakat dan pihak eksternal lainnya?
5. Bagaimana BAPPEDA mengatasi tantangan komunikasi atau pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan Penyusunan RKPD Kota Medan?

c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

1. Bagaimana BAPPEDA terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi penyusunan RKPD Kota Medan?
2. Bagaimana BAPPEDA mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program yang tercantum dalam RKPD Kota Medan setelah pelaksanaannya?
3. Bagaimana BAPPEDA menjalin konsensus antara berbagai pihak yang terlibat, seperti lembaga legislatif, pihak swasta, atau pihak masyarakat, terkait dengan penyusunan RKPD Kota Medan?

2) Informan Tambahan

Nama Informan :

1. Kassubbag Umum dan Kepegawaian Siti Khadijah, SH
2. Pengelola Sarana Prasarana Kantor Zainul Hakim Lubis.

a. Peranan Antarperibadi (*Interpersonal Role*)

1. Bagaimana langkah-langkah awal yang diambil oleh BAPPEDA dalam memulai proses penyusunan RKPD Kota Medan?
2. Bagaimana peranan BAPPEDA sebagai figur atau simbol kepemimpinan dalam proses penyusunan RKPD Kota Medan?
3. Bagaimana BAPPEDA mendefinisikan peranannya dalam penyusunan RKPD Kota Medan?

4. Bagaimana BAPPEDA bertindak sebagai penghubung antar organisasi dalam proses penyusunan RKPD Kota Medan?
5. Bagaimana BAPPEDA melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada tahap-tahapan penyusunan RKPD Kota Medan?

b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)

1. Bagaimana BAPPEDA memfasilitasi kerja sama dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terlibat dalam penyusunan RKPD Kota Medan?
2. Bagaimana BAPPEDA berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti LSM, sektor swasta, atau komunitas lokal, dalam rangka penyusunan RKPD Kota Medan?
3. Bagaimana upaya khusus yang dilakukan untuk membangun dukungan dan keterlibatan pihak eksternal dalam penyusunan RKPD Kota Medan?
4. Bagaimana BAPPEDA menjelaskan visi dan program-program yang terkandung dalam RKPD Kota Medan kepada masyarakat dan pihak eksternal lainnya?
5. Bagaimana BAPPEDA mengatasi tantangan komunikasi atau pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan Penyusunan RKPD Kota Medan?

c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

1. Bagaimana BAPPEDA terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi penyusunan RKPD Kota Medan?
2. Bagaimana BAPPEDA mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program yang tercantum dalam RKPD Kota Medan setelah pelaksanaannya?
3. Bagaimana BAPPEDA Kota Medan menjalin konsensus antara berbagai pihak yang terlibat, seperti lembaga legislatif, pihak swasta, atau pihak masyarakat, terkait dengan penyusunan RKPD Kota Medan?

